

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP¹ per kapita \$ 70 menjadi lebih dari \$1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing. Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang. Secara ekonomi makro Indonesia terlihat menjadi negara yang berkembang pesat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan *collateral* menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas

¹GDP adalah nilai semua barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada periode tertentu

peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.

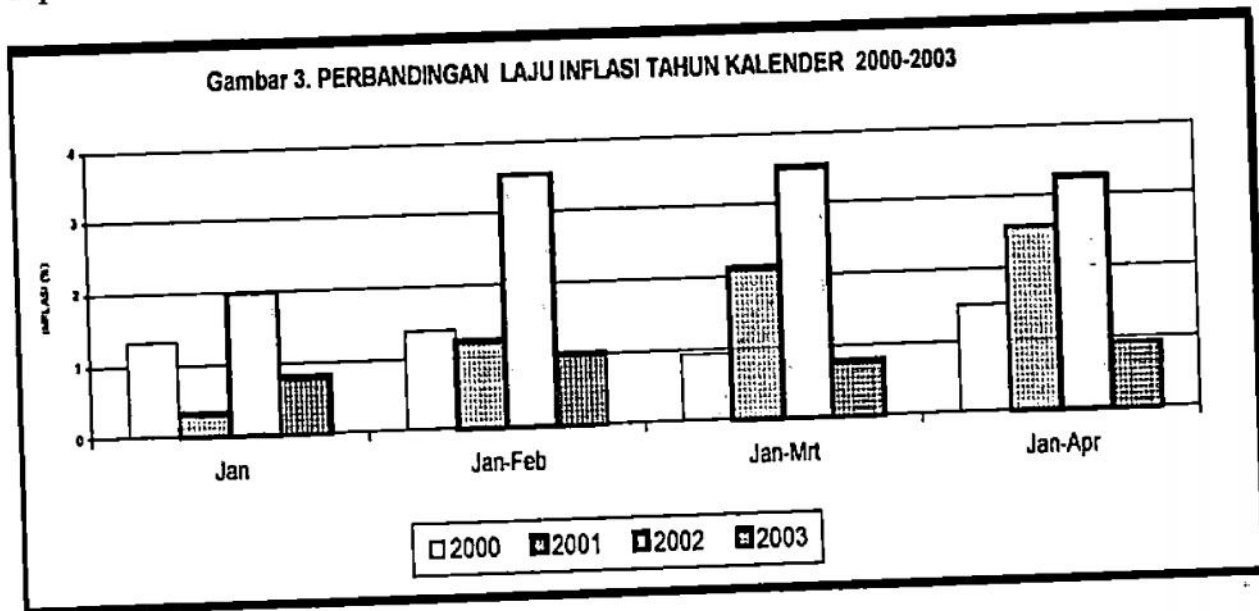
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia dalam bidang ekonomi terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998. Sidang Istimewa MPR yang mengukuhkan Habibie sebagai Presiden menggantikan Soeharto. Masa pemerintahan Habibie ditandai dengan dimulainya melonggarkan pengawasan terhadap media massa dan kebebasan berekspresi sebagai salah satu agenda pertama pemerintahannya. Pada masa pemerintahan Habibie Indonesia masih mengalami kondisi yang sosial ekonomi yang buruk pasca turunnya Suharto.

Krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.

Krisis kepercayaan yang terjadi di masyarakat pasca turunnya Suharto membuat pemerintah menyelenggarakan pemilu pada tahun 1999. PDI yang berubah nama menjadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan pemilu. Meski tidak menang telak, namun berhasil meraih lebih dari tiga puluh persen suara. Massa PDI Perjuangan mendesak supaya Mega menjadi presiden, namun alur yang berkembang dalam Sidang Umum 1999 mengatakan lain, sidang memilih KH Abdurrahman Wahid sebagai Presiden. Ia kalah tipis dalam voting pemilihan Presiden: 373 banding 313 suara. Megawati Sukarnoputri tidak harus menunggu lima tahun untuk menggantikan posisi Presiden Abdurrahman Wahid, setelah Sidang Umum 1999 menggagalkannya menjadi Presiden. Sidang Istimewa MPR, Senin 23 Juli 2001 telah menaikkan statusnya menjadi Presiden, setelah Presiden Abdurrahman Wahid dicabut mandatnya oleh MPR RI.

Era kepemimpinan Megawati yang hanya sekitar tiga tahun meneruskan masa kepemimpinan Gus Dur yang diturunkan oleh konstitusi, menjadikan masa tersebut

menjadi masa yang sangat singkat untuk dapat menjalankan program kerja yang telah disusun oleh tim ahli bentukan Megawati. Program kerja tersebut diharap dapat menjadi jawaban tantangan dan problematika yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia pada saat itu. Program kerja Megawati kedepannya oleh beberapa kalangan dinilai berhasil. khususnya dilihat dari indikator-indikator seperti IHSG (indeks harga saham gabungan), tingkat suku bunga deposito, dan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar AS yang relatif stabil. Digambarkan pula bahwa jumlah orang miskin yang turun signifikan dari tahun 1999-2004 sehingga kini berada pada sekitar 24 jutaan². Megawati dalam pencapaian pemerintahannya dinilai pengamat melebihi pencapaian Gus Dur baik dalam bidang fiskal maupun kenegaraan. Tingkat inflansi selama pemerintahan Megawati juga menunjukkan kecenderungan yang baik, ini dapat terlihat dari tabel 1 dibawah :



Sumber dari biro Pusat Statistik

² Pemerintahan SBY, Perubahan dan Kesenambungan, Sjaharir (diakses 18 juli 2010) dari

Pencapaian inilah yang nantinya akan diwariskan oleh pemerintahan selanjutnya, keberhasilan dalam bidang ekonomi akan berdampak banyak terhadap kesejahteraan rakyat yang tentunya menjadi tujuan awal terbentuknya negara Indonesia. Pada tanggal 20 Oktober 2004 presiden Indonesia periode 2004 -2009 dilantik. Sesuai dengan hasil pemilu maka pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla ditetapkan menjadi pemenang, mengalahkan pasangan Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dalam pemilu putaran kedua.

Indonesia pasca pemerintahan Megawati memang mengindikasikan keadaan ekonomi, sosial, dan politik yang stabil. Harga barang dan jasa terdapat pada kisaran yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Cadangan devisa yang cukup dan nilai tukar yang stabil Dalam masa kampanye pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla mengucapkan beberapa janji apabila terpilih menjadi pasangan Presiden dan wakil presiden, janji tersebut antara lain : meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada rentang waktu 2004-2009 baik dari segi makro maupun mikro, menjaga laju inflasi tetap stabil, mengurangi jumlah penduduk miskin dan penurunan angka pengangguran terbuka, menegakkan supremasi hukum HAM, menjaga kesinambungan hubungan baik dengan negara-negara sahabat³. Dalam pidato kenegaraanya di Istana Negara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan beberapa permasalahan yang masih dihadapi oleh pemerintahanya dan akan segera diselesaikan. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah

³ Demokrasi, Pilpres 2004, dan Perubahan Baru, Dandan Wildan (diakses 18 Juli 2010) dari

- Pertumbuhan ekonomi tahun ini yang masih jauh di bawah 7 %, belum cukup untuk memberikan lapangan kerja.
- Lebih dari 10 juta saudara kita masih menganggur.
- 16% dari jumlah penduduk kita masih hidup dibawah garis kemiskinan.
- Walaupun ada kecenderungan rasio hutang terhadap PDB menurun, namun masalah hutang telah menjadi beban besar yang melilit perekonomian kita.
- Saudara-saudara kita di Aceh dan di Papua masih resah.
- Situasi keamanan di Poso dan Maluku sudah terkendali, namun belum sepenuhnya pulih.
- KKN Masih terus menjadi persoalan sistemik.
- Situasi internasional masih tidak menentu.
- Harga minyak terus melambung jauh di atas asumsi APBN.
- Dan ancaman terorisme serta kejahatan trans-nasional masih terus menghantui kita.⁴

Permasalahan-permasalahan tersebut yang akan menjadi agenda utama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dalam menjalankan roda pemerintahan untuk lima tahun mendatang. Dalam rangka melaksanakan apa yang telah diamanatkan rakyat dan menjawab segala janji-janji yang telah diberikan pada waktu pemilu maka Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla membentuk kabinet, berdasarkan beberapa orang ahli dalam bidangnya masing-masing. Kabinet tersebut nantinya menjadi perpanjangan kaki tangan Presiden secara langsung dalam

⁴ Sumber: <http://unitkom.indonesian-embassy.or.jp/menuei/information/resmi.htm>
 Koleksi: Perustakaan Nasional RI 2006 diakses 18 Juli 2010

melaksanakan agenda pemerintahan yang telah disusun dan melaporkan segala hasil yang telah dicapai setiap departemen langsung kepada Presiden, untuk dilaporkan kembali dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pembentukan kabinet langsung dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebelum dilantik secara resmi. Proses perekrutan menteri-menteri dalam kabinet tersebut berbeda dengan proses perekrutan yang dilakukan oleh pemerintah yang sebelumnya. Dalam proses perekrutan kabinet Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla setiap calon menteri dipanggil dan diwawancarai mengenai permasalahan yang menyangkut kondisi Indonesia berdasarkan departemen yang akan di bawahinya. Setelah proses wawancara selesai maka setiap calon menteri diwajibkan menandatangani kontrak politik. Meskipun pemilihan menteri tersebut banyak diindikasikan sebagai politik balas jasa Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla terhadap pihak-pihak yang telah mengantarkan keduanya kepada kursi Presiden dan wakil Presiden oleh beberapa kalangan, namun rumor tersebut tidak dihiraukan.

Setelah susunan menteri-menteri dan pembantu Presiden lengkap terisi oleh calon-calon yang terpilih, maka peresmian kabinet masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla periode 2004-2009 resmi dilantik di Istana Negara pada tanggal 21 Oktober 2004. Kabinet tersebut dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu. Terdiri dari empat menteri koordinator, delapan belas menteri departemen, dua belas menteri negara, dan dua pejabat setingkat menteri. Kabinet yang diharap dapat menjawab tantangan dan menyelesaikan permasalahan yang

dihadapi oleh bangsa ini. Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla sebagai kepala pemerintahan dan wakilnya diharapkan dapat mengarahkan dan mengawasi para menteri dalam menjalankan tugasnya. Dan bagi mereka yang terbukti melakukan penyelewengan diharap mundur dari jabatannya sebagai menteri.

Saat ini satu dekade dari krisis moneter yang melanda Asia, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makro ekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui perubahan besar desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005 harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makro ekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat resiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.

Keputusan tersebut memberikan US\$ 10 milyar tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US\$ 5 milyar telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh

pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US\$ 15 milyar ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan.⁵ Negara ini belum mengalami ruang fiskal yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.

Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US\$ 10 milyar dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.

Berkat keputusan pemerintahan untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah provinsi dan

⁵ http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Indonesia ;diakses 18 Juli 2010

kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen dari total dana publik⁶, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development). Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Oleh sebab itu alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut, pada saat dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.

Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen dari total belanja publik (mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001) sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB⁷. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat

⁶ ibid

⁷ ibid

pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.

Banyak kebijakan yang tidak populer di mata masyarakat pada pemerintahan SBY. Salah satunya adalah pengesahan RUU BHP. Sejak awal disiapkan, RUU BHP yang merupakan amanat UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memang menuai berbagai persoalan. Dominasi isu yang muncul adalah apakah negara bermaksud melepaskan tanggung jawab konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertulis dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Isu ini semakin kuat jika dikaitkan dengan gejala liberalisasi (neoliberalisme) atas nama profesionalisme dan korporasi yang sudah terjadi pada sektor-sektor yang lain melalui privatisasi. Apalagi di dalam draf-draf awal RUU BHP tersebut dimungkinkan dan dimudahkannya lembaga pendidikan tinggi asing mendirikan BHP di Indonesia melalui kerja sama dengan BHP Indonesia yang telah ada. Pasal ini memiliki sisi positif untuk meningkatkan daya saing pendidikan tinggi untuk menyerap pengetahuan pendidikan tinggi asing, tetapi juga dapat memiliki dampak negatif berupa liberalisasi pendidikan tinggi yang dapat menyebabkan intervensi dan penguasaan pendidikan oleh lembaga pendidikan tinggi asing

Kontroversi lainnya adalah seputar biaya pendidikan yang dikhawatirkan akan semakin mahal dengan terbentuknya BHP. Kekhawatiran ini berasal dari praktik perguruan tinggi badan hukum milik negara (PT BHMN) sebagai spesies BHP yang selama ini terjadi dan bertendensi memarginalisasi anak-anak tidak mampu untuk mengenyam pendidikan. Perjalanan dan perenungan terhadap praktik PT BHMN selama ini menyimpulkan bahwa pembiayaannya masih berpijak pada biaya operasional pendidikan (BOP) yang dipungut dari peserta didik. Hal ini terjadi karena berbagai persoalan, seperti aset PT BHMN yang masih dimiliki oleh negara menyebabkan kesulitan pengembangan sumber penerimaan lain dari aspek bisnis

Demikian pula tuntutan UU BHP untuk akuntabilitas, keterbukaan, partisipasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang justru dikhawatirkan adalah kemampuan negara untuk membiayai $\frac{1}{3}$ biaya operasional (pendidikan menengah) dan $\frac{1}{2}$ biaya operasional (pendidikan tinggi) bagi seluruh BHPP dan BHPPD. Nilai itu belum termasuk biaya investasi, beasiswa, dan subsidi lain. Dana ini juga belum termasuk bantuan pemerintah dan pemerintah daerah kepada BHPM. Jika pemerintah tak memiliki dana cukup untuk membiayai itu semua, maka kekhawatiran dalam praktik PT BHMN selama ini akan terjadi. Hal lain yang cukup mengganggu, sering kali implementasi UU terhambat oleh buruknya kapasitas sistem birokrasi negara. Jika bantuan dana tersebut dilakukan melalui birokrasi negara, bukan tidak mungkin proses pendidikan secara keseluruhan juga akan terwarnai oleh buruknya kompetensi dan rusaknya moralitas birokrasi

Kebijakan lain yang diambil oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudharyana adalah menaikkan harga BBM pada 1 Maret 2005 sebesar 32%, dari Rp 2.400 menjadi Rp 4.500 dan pada 1 Oktober 2005 sebesar 87,5%, dari Rp 4.500 menjadi Rp 6.000⁸. Kebijakan ini sangat tidak populer di mata masyarakat, banyaknya demo dan aksi-aksi mengancam kebijakan tersebut muncul secara serentak di daerah-daerah. Kebijakan tersebut sangat tidak sesuai dengan janji yang telah disampaikan SBY pada masa kampanye maupun pada saat pidato di istana negara. Kenaikan harga BBM dan pencabutan subsidi minyak tanah pada masa pemerintahan SBY terbukti meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Antara 1976-1993, angka kemiskinan di Indonesia turun drastis dari 40,1 persen menjadi 11,3 persen total penduduk Indonesia. Akibat krisis multidimensi yang menerpa Indonesia, jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998 melonjak drastis dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (BPS, 1999). Pada akhir 1999, International Labour Organization (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. (BPS-UNDP, 1999). Indonesia juga masih dililit problema pengangguran mencapai 38,3 juta jiwa angkatan kerja. Sebanyak 30,2 juta jiwa di antaranya adalah pengangguran terbuka (mencapai 78,85 persen). Jumlah penduduk miskin pada Maret 2006 sebanyak 39,05 juta atau 17,75

⁸ <http://moharifwidarto.wordpress.com/2009/01/19/membodohi-rakyat-dengan-penurunan-harga->

persen dari total 222 juta penduduk. Penduduk miskin bertambah empat juta orang dibanding yang tercatat pada Februari 2005. Tanpa Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak, jumlahnya mencapai 50,8 juta. Kondisi itu diketahui dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2006. Sebelumnya, Susenas Februari 2005 menunjukkan jumlah penduduk miskin sebesar 35,10 juta atau 15,97 persen dari total penduduk. Kecadaan yang terjadi jauh dari harapan dan janji pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yaitu mengurangi jumlah orang miskin dan pengangguran di Indonesia.

B. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang diatas maka munculah suatu pertanyaan "Mengapa beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono meningkatkan jumlah orang miskin di Indonesia."

C. Kerangka Teori

Teori-teori itu pada pokoknya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala yang diteliti atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Kerangka dasar teori berguna untuk membantu peneliti dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, dan dalam memilih konsep. Konsep yang tepat berguna untuk membentuk hipotesanya maka perlu diperhatikan

bahwa teori bukanlah merupakan pengetahuan yang sudah pasti akan tetapi harus dianggap sebagai petunjuk hipotesis.⁹

Dalam dunia ilmu sosial istilah korporatokrasi belum digunakan secara meluas dan relatif baru. Sejauh penulis ketahui adalah John Perkins, dalam buku *Confessions of an Economic Hit Man* (2004) yang menggunakannya untuk menunjukkan bahwa dalam rangka membangun imperium global, maka berbagai korporasi besar, bank dan pemerintahan bergabung menyatukan kekuatan finansial dan politiknya untuk memaksa masyarakat dunia mengikuti kehendak mereka. Menurut Perkins, korporatokrasi dilukiskan sebagai sistem kekuasaan negara yang dikontrol oleh berbagai korporasi besar, bank-bank internasional dan pemerintahan.

Bruce
✓ Sudri

"Istilah itu begitu saja datang bertenger dipikiran saya: Korporatokrasi. Saya tidak yakin apakah saya sudah pernah mendengarnya sebelumnya atau saya yang menciptakannya tetapi istilah itu tampak sangat cocok duntuk menggambarkan elite baru yang telah berketetapan untuk menguasai planet bumi". (*A word came to my mind: corporatocracy. I was not sure whether I had heard it before or had just invited it, but it seemed describe perfectly the new elite who had made up their mind to attemp to rule the planet*)¹⁰

Sesungguhnya istilah korporatokrasi dapat digunakan untuk menunjukkan betapa korporasi atau perusahaan besar memang dalam kenyataanya dapat mendikte, bahkan kadang-kadang membeli pemerintahan untuk meloloskan keinginan mereka.

⁹ Moly G.Tan. *Masalah-Masalah Perencanaan Penelitian*. Dalam buku Kontjaraningrat *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. PT. Gramedia Pustaka, Jakarta 1983 hal. 21

¹⁰ Perkins, John. *Confession of an Economic Hitman*. 2005: Berrett-Koehler Publisher Inc. San Francisco, hal 31

Korporatokrasi juga bisa dilihat sebagai sistem atau mesin kekuasaan yang bertujuan untuk mengontrol ekonomi dan politik global yang memiliki 7 unsur, yaitu: korporasi-korporasi besar; kekuatan politik pemerintahan tertentu, terutama Amerika dan kaki tangannya; perbankan Internasional; kekuatan militer; media massa; kaum intelektual yang dikooptasi; dan terakhir, yang tidak kalah penting adalah elite nasional negara-negara berkembang yang bermental inlander, komprador atau pelayan.¹¹

Aplikasi Teori

Apabila dicermati banyak pengusaha yang duduk dalam kabinet Indonesia bersatu, bisa dikatakan para pengusaha mendominasi kabinet. Di pucuk ada Wakil Presiden M. Jusuf Kalla. Terakhir, sebelum masuk ke kabinet Abdurrahman Wahid sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Kalla menjadi Komisaris Utama Bukaka Teknik Utama. Di jajaran menteri koordinator, ada dua pengusaha, yakni Aburizal Bakrie (pemilik Bakrie & Brothers), dan Alwi Shihab. Di kelompok menteri, ada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris (Kodel), Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi Hatta Radjasa, dan Menteri Negara Pariwisata Jero Wacik. Selain mereka, Menteri Negara BUMN Sugiharto dan Menteri Negara Perumahan Rakyat Yusuf Asy'ari lama menduduki jabatan eksekutif. Sugiharto di kelompok usaha Medco, dan Yusuf di RCTI.

¹¹ Rais. Amien. 2008. *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia*. Yogyakarta: PPSK Press hal

Oleh beberapa pengamat peran pengusaha dalam kabinet Susilo Bambang Yudharyana dan Jusuf Kalla rawan akan munculnya konflik kepentingan. Memang dalam sejarah pembentukan kabinet di Indonesia, peran pengusaha di dalam susunan pemerintah sangat sering ditemui. Pada era orde baru setiap menteri bahkan sudah biasa merangkap menjadi pengusaha dan dengan sangat jelas menggunakan wewenang yang dimiliki untuk melancarkan bisnis pribadi dalam rangka memperkaya diri sendiri. Inilah yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan, karena belum adanya aturan yang jelas yang membatasi peran pengusaha yang merangkap menjadi menteri atau jabatan penting lainnya dalam pemerintahan. Aturan yang dapat mengawasi dan mengontrol dengan jelas setiap langkah dan perilaku menteri atau pejabat negara lainya yang merangkap menjadi pengusaha dalam kehidupan berpolitiknya, agar dapat menetralsir kebijakan atau langkah yang mereka ambil atau terapkan. Publik kontrol yang paling bagus dalam mengawasi perangkapan jabatan tersebut adalah masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pengawasan langsung dari masyarakat dalam bentuk kelompok sosial atau lembaga dapat dengan tegas melaporkan jika disinyalir adanya penyalahgunaan wewenang.

Contoh yang paling jelas adalah ketika lumpur lapindo menenggelamkan wilayah porong Sidoarjo. Aburizal Bakrie yang pada saat itu menjabat Menetri Kesejahteraan Rakyat yang juga pemilik Pt Minarak Lapindo anak perusahaan Bakrie Brothers jelas mempunyai perang kepentingan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Indikasinya adalah dikeluarkanya kepres Kerpres No 13 Tahun 2006 menyatakan PT. Lapindo Brantas bertanggungjawab atas pembiayaan operasional

Tim Nasional Penanggulangan Lumpur, namun masalah timbul setelah munculnya Peraturan Presiden No 14 Tahun 2007. Jika Keppres 13/2006 menyebutkan semua akibat sosial dan biaya Tim Nasional ditanggung Lapindo, Perpres 14 tahun 2007 melonggarkan tanggungjawab Lapindo. Lapindo hanya bertanggung jawab atas korban yang berada di dalam peta, sementara korban yang di luar peta ditanggung oleh pemerintah menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada akhir 2007 Ical, sapaan Abu Rizal Bakrie, selaku Menko Kesra, sebagaimana dikutip *Suara Karya Online*, mengambil kebijakan memotong 1 dari 2 triliun dana perjalanan dinas tidak mengikat Departemen Kesehatan untuk menalangi Askeskin. Sangat mungkin dana ini banyak dihabiskan untuk para korban lumpur Lapindo, JPKM atau Asuransi Kesehatan Untuk Masyarakat Miskin (Askeskin) adalah program kesehatan hasil karya Abu Rizal Bakrie selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Masyarakat (Menko Kesra). Dari indikasi tersebut jelas terlihat adanya lobi politik dalam menyelesaikan permasalahan Lumpur Lapindo oleh Aburizal Bakrie selaku menteri dan pemilik perusahaan dengan pemerintah dalam hal ini Presiden.

Memang dalam kenyataan politik pemilihan menteri beserta pejabat-pejabat penting dalam BUMN adalah salah satu wewenang presiden dalam penentuannya, namun seharusnya dalam pemilihan tersebut juga dipertimbangkan aspek kapabilitas dari pihak yang akan ditempatkan dalam suatu jabatan. Mungkin langkah tersebut sudah terpikirkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono sebagai suatu strategi dalam menjalankan roda pemerintahan, dengan tujuan agar setiap departemen maupaun

BUMN terdapat ikatan batin dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Apakah langkah politik yang telah diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam mengangkat menteri dari kalangan pengusaha beserta pejabat BUMN dari kalangan sendiri merupakan suatu langkah politik yang tepat dalam rangka memajukan perekonomian Indonesia dalam kurun waktu lima tahun atau hanya merupakan langkah politik balas jasa kepada pihak yang loyal dan telah berjasa mengantarkan keduanya dalam tampuk kepemimpinan Indonesia, lalu apakah peran negara beserta perangkatnya (DPR/MPR) juga ikut berperan besar dalam memajukan perekonomian kita.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah jawaban sementara terhadap masalah-masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji dan dibuktikan. Berdasarkan latarbelakang masalah dan perumusan masalah yang kemudian didekati dengan kerangka teori yang dikemukakan, maka penulis membuat kesimpulan sementara. Ditihat dari pokok permasalahan mengapa beberapa kebijakan yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono menambah jumlah orang miskin di Indonesia penulis memperoleh hipotesa sebagai berikut : Karena adanya tiga elite penting pemerintahan yang bersifat komprador, tekanan Lembaga Keuangan Internasional dan intervensi Multinasional Corporation menambah jumlah orang miskin di Indonesia.

E. Jangkauan Penelitian

Penulis mengambil jangkauan penelitian dengan data-data yang ada dalam rentang waktu masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada tahun 2004-2008. Data yang diambil mengenai kebijakan dan langkah pemerintah dalam usaha memperbaiki keadaan bangsa Indonesia tidak terkecuali dengan aparatur pemerintahan.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data penulisan ini adalah dengan studi pustaka (library research) yang berupa pengumpulan data-data sekunder dari buku-buku, terbitan ilmiah, majalah, surat kabar dan lain sebagainya yang tentunya relevan dengan tema yang ada.

G. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini dibagi menjadi dua yaitu :

- Secara khusus penulisan ini ditujukan untuk memenuhi persyaratan akademis pada jenjang studi strata 1, di Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, jurusan ilmu hubungan internasional.
- Secara umum penulisan ini berguna untuk mengkaji langkah politik dan kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla dalam masa pemerintahannya yang ditujukan untuk mengatasi masalah

ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia melalui Kabinet Indonesia Bersatu.

II. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan menulis tentang latar belakang, pokok permasalahan, kerangka teori, hipotesa jangkauan penelitian metode pengumpulan data, tujuan penulisan, sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang Indonesia dalam masa transisi dan kondisi ekonomi pada era Susilo Bambang Yudhoyono, Indonesia sebelum masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla, program kerja Susilo Bambang Yudhoyono Jusuf Kalla, kondisi ekonomi Indonesia dan implikasi program kerja.

Bab III menulis tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla, keberadaan elite politik yang bersifat korprador, tekanan IMF dan World Bank, intervensi MNC's dalam deregulasi undang- undang.

Bab IV menulis kesimpulan